

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat bantu program SPSS 17.0 dan wawancara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Kupang belum melakukan penyesuaian dan perubahan dalam penyajian laporan keuangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ke PP Nomor 71 tahun 2010.
3. Penyajian seluruh laporan keuangan pemerintah kabupaten Kupang mengalami keterlambatan. Walaupun pada laporan keuangan tersebut disajikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember, namun pada kenyataannya laporan keuangan baru dapat diselesaikan dan disahkan pada Juli tahun berikutnya.
4. Kemampuan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan masih relatif rendah dalam mengoperasikan sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu aplikasi sistem informasi manajemen daerah. Berdasarkan wawancara, hal tersebut disebabkan karena sering terjadinya perubahan peraturan sehingga membutuhkan

waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi kepada setiap pegawai yang terlibat langsung dalam penyajian laporan keuangan. Di samping itu, juga disebabkan oleh keterbatasan dalam ketersediaan perangkat pendukung yang meliputi infrastruktur, komputer dan aplikasi.

6.2 Saran

Laporan keuangan merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian bisa diketahui bahwa laporan keuangan memberi kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Kupang harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna internal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Kupang diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kupang hendaknya berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, agar penyusunan dan penyajian laporan

keuangan pemerintah daerah yang efektif dapat terwujud demi terwujudnya akuntabilitas.

2. Pemerintah Kabupaten Kupang hendaknya mampu untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara menempatkan sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang memiliki wewenang dan terlibat langsung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Pemerintah Kabupaten Kupang hendaknya melakukan peningkatan pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan daerah dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan teknis maupun non teknis mengenai penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan juga harus dilakukan pada kualitas dan kuantitas sarana pendukung berupa komputer dan aplikasi mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, agar penyajian laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2005. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, volume 2 Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 1-17.
- Nordiawan, Deddy, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta
- Sande, Pegy, 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, volume 3, Nomor 2, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
- Bandariy, Himmah, 2011. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*, Jurnal Akuntansi dan Auditing, volume 3, Nomor 1, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyana, 2010. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. 2000. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAN. Jakarta.
- Anonim, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Anonim, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Anonim, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

Anonim, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*

Anonim, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

LAMPIRAN